

**KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH DI KANTOR
KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT**

S K R I P S I

OLEH

SUKANTI

N P M : 99.850.0074

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 3**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH DI KANTOR KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT

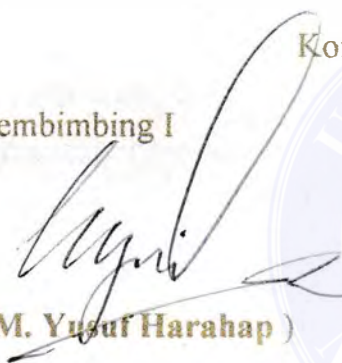
Nama Mahasiswa : SUKANTI

NPM : 99 850 0074

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Drs. H.M. Yusuf Harahap)

Pembimbing II



(Hj. Aminatun Nst, SH)

Mengetahui

Ketua Program Studi

(Dra. Rosmala Dewi)

Dekan



(Drs. Usman Tarigan, MS)

Tanggal Lulus : Agustus 2003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sekalian, semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di Yaumul Akhir amin.

Skripsi ini berjudul **“KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT”**, dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan tulisan ilmiah ini banyak kesulitan-kesulitan baik waktu mengadakan riset maupun dalam merangkai kalimat demi kalimat ini jelas dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan plus pengalaman yang penulis miliki.

Namun begitu, atas pengarahan dan bimbingan yang diberikan dosen pembimbing, akhirnya penulis dapat mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi dan sebagai rasa syukur hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan masing-masing kepada yang terhormat.

1. Ir Zulkarnaen, MA Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Usman Tarigan MS Dekan Fisipol Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. M Yusuf Harahap bertindak sebagai Dosen Pembimbing I
4. Ibu Hj. Aminatun Nasution SH bertindak sebagai Dosen Pembimbing II

5. Para Bapak dan Ibu Dosen Universitas Medan Area Medan yang telah memberikan petunjuk dan perkuliahan kepada penulis mulai semester Pertama sampai semester terakhir.
6. Bapak Bupati Langkat yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area, Kampus Medan.
7. Ibu Kepala Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sekcam, para Ka Seksi dan staf yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis
8. Ibunda dan Almarhum Ayahanda W Tugimin yang penuh keikhlasan memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan study pada universitas Medan Area di Medan.
9. Khusus kepada Istriku tercinta Rustiati dan anak tersayang Ika Rusani dan Dwi Suriyanto yang telah memberikan semangat dan dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara saudara ku yang juga telah memberikan semangat dan dorongan baik moral maupun material kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Disamping ucapan terima kasih juga penulis mendoakan semoga bantuan dan dukungan yang telah di berikan kepada penulis, kiranya mendapat imbalan amal yang sepadan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi aparat pemerintah kecamatan di Kabupaten Langkat.

Medan,..... 2003.

Penulis

SUKANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Hipotesis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Batasan Pengertian Camat	7
B. Pengertian Pemerintahan Kecamatan	8
C. Pengertian Pembangunan	11
D. Kepemimpinan Camat Sebagai Kepala Kecamatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Populasi dan Sampel	23
B. Metode Pengumpulan Data	24
C. Variabel dan Defenisi Operasional	25
D. Teknik Analisa Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	27
A. Keadaan Alam	28
B. Keadaan Masyarakat	29
C. Iklim dan Curah Hujan	31
D. Organisasi Pemerintah	31
E. Sosial Ekonomi	32
F. Keadaan Jumlah Penduduk di Kecamatan Wampu Berdasarkan Agama	33

BAB V	EVALUASI DAN ANALISIS.....	39
	A. Koordinasi dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	39
	B. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Wampu	46
	C. Efek Koordinasi Terhadap Pentingnya Pelaksanaan Peningkatan Administrasi Pemerintahan.....	50
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan administrasi pemerintah di berbagai departemen yang merata dan membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, perlu dijalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan keutuhan negara kesatuan dan juga untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintah, maka wilayah kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Dalam kaitan ini diperlukan adanya peraturan tentang bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu undang-undang. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tahun 1999-2004 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan beberapa landasan dalam penyelenggaraan administratif pemerintahan.

Dari isi Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya jelas bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan, sebagai konsekwensi dari prinsip tersebut di atas maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan tegas dinyatakan adanya daerah otonom dan wilayah administrasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut wilayah itu dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi yang disebut wilayah administratif, maka wilayah-wilayah disusun secara vertikal, dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari isi pelaksanaan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka dikeluarkan undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom".¹ Selanjutnya dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

Kepala Kecamatan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Pemerintah Kecamatan terdiri dari camat dan perangkat kecamatan. Kecamatan Wampu adalah salah satu dari Kecamatan yang ada di

¹. Institut Ilmu Pemerintahan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Kartono Kartini, *Pimpinan dan Kepemimpinan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- , *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni Bandung, 1986.
- Namawi Hadari, *Metode Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- Ndaraha Taliziduhu, Drs, *Administrasi Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1972.
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, Bagian Kedua, 1966.
- Rakhmat Jalaluddin, Drs, MSc, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Saleh Wantjik. K, UU No. 5 tahun 1974, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Administrasi*, Agung, Jakarta, 1992.
- S. Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Sujana, *Statistika*, Tarsito Bandung, 1986.
- Surachmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research Suatu Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1979.
- Suryaningrat Bayu, *Mengenai Ilmu Pengetahuan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- Suryono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali Jakarta, 1985.